

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Sulthan Ardhieka Nabigh F

NPP. 32.0240

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0240@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Aleknaek Martua, M.E

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Poverty is the inability of individuals or groups to fulfill the minimum basic needs for a decent life, such as clothing, food, shelter, education, and health. Poverty in South Sumatra Province showed a figure of 11.90% in 2022. It decreased to 11.78% in 2023. After that, in 2024 the percentage of poverty in South Sumatra Province was 10.97%. In the last three years the poverty rate in South Sumatra Province is still above the national poverty average. So that effective steps are needed through the involvement of actors outside the government so that the concept of collaborative governance is carried out. **Purpose:** To analyze the implementation of collaborative governance in the implementation of poverty reduction policies in South Sumatra Province. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Interviews are aimed at informants selected based on their participation in poverty alleviation. The number of informants in this study is 7. The implementation of data analysis used through data reduction, data presentation and also drawing conclusions and verification. **Result:** The results of this research indicate that in the initial condition dimension with three indicators, it was found that there was a problem in one of the indicators, namely incentives. In the institutional design dimension with clear rules and transparency indicators, it has been running well. After that, in the facilitative leadership dimension, it has also been running well. After that, in the collaboration process dimension with its five indicators, it shows good results. After that, in the right policy dimension, this policy can solve the problem. After that, in the right implementation dimension, the indicators are running well, namely with collaboration between the government, society and CSR. After that, in the right target dimension, there is a problem with the readiness of the intervention target. After that, in the right policy environment dimension, namely external and internal, this shows that there are problems that occur in the external environment of the policy. **Conclusion:** Collaboration between local governments, the private sector (CSR), and communities in poverty alleviation still faces resource imbalances, lack of incentives, and suboptimal participation of certain stakeholders. However, institutional design and a history of good cooperation are supporting factors. This study contributes to collaboration in public policy and provides practical recommendations for increasing synergy between actors in poverty alleviation.

Keywords: Collaborative Governance, Policy Implementation, Poverty, Public Policy.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak, seperti sandang, pangan, papan,

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka 11,90% pada tahun 2022. Penurunan menjadi 11,78% pada tahun 2023. Setelah itu, pada tahun 2024 persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,97%. dalam tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih diatas rata-rata kemiskinan nasional. Sehingga dibutuhkan langkah efektif melalui keterlibatan aktor diluar pemerintahan sehingga konsep collaborative governance dilakukan. **Tujuan:** Untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada informan yang dipilih berdasarkan keikutsertaannya dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 7. Pelaksanaan analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan pada dimensi kondisi awal dengan tiga indikatornya didapatkan bahwa terdapat masalah pada salah satu indikator yaitu insentif. Pada dimensi desain kelembagaan dengan indikator aturan jelas dan transparansi sudah berjalan dengan baik. Setelah itu, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif juga berjalan dengan baik. Setelah itu, pada dimensi proses kolaborasi dengan kelima indikatornya menunjukkan hasil yang baik. Setelah itu, pada dimensi tepat kebijakan, kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan. Setelah itu, dimensi tepat pelaksanaan, indikatornya berjalan dengan baik yaitu dengan adanya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan CSR. Setelah itu, dimensi tepat target, terdapat permasalahan pada kesiapan targer intervensi. Setelah itu, dimensi tepat lingkungan kebijakan, yaitu eksternal dan internal, hal ini menunjukkan adanya masalah yang terjadi pada lingkungan eksternal kebijakan. **Kesimpulan:** Kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta (CSR), dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan masih menghadapi ketidakseimbangan sumber daya, kurangnya insentif, serta belum optimalnya partisipasi stakeholders tertentu. Meski demikian, desain kelembagaan dan sejarah kerja sama yang baik menjadi faktor pendukung. Penelitian ini berkontribusi terhadap kolaborasi dalam kebijakan publik dan memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan sinergi antar aktor dalam penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kebijakan Publik.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan fundamental yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia (Sinurat, 2023). Kemiskinan sendiri merupakan kondisi dimana manusia tidak mampu mencapai taraf kehidupan yang seharusnya (Dasgupta, 1982). Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. Pada tujuan 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), "No Poverty" (Tanpa Kemiskinan) merupakan fokus utama, dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan secara keseluruhan di seluruh dunia pada tahun 2030 (Mahadiansar & Romadhan, 2021). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup dengan layak. Masyarakat miskin biasanya memiliki kemampuan yang kurang dalam berusaha, serta adanya keterbatasan akses dalam kegiatan perekonomian, sehingga cenderung memiliki penghasilan yang rendah dan bahkan tidak mempunyai penghasilan sehingga menimbulkan ketertinggalan dari masyarakat lainnya (Nawawi et al., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, salah satu prioritas

penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah kemiskinan. Pada pasal 19, dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan ialah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Kondisi kemiskinan di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum terselesaikan dengan efektif.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan dan bekerja sama satu sama lain sehingga lebih mencapai tujuan dan berhasil (Heger et al., 2020). Pemerintah dapat menggunakan TKPK di tingkat pusat hingga daerah untuk memastikan program pemerintah berjalan secara terpadu dan mencapai masyarakat miskin dan rentan secara lebih efisien. Pada tingkat daerah, TKPK berfungsi sebagai forum bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik kemiskinan lokal dan memantau pelaksanaan program secara berkala. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan TKPK tidak hanya menekankan pada penyediaan bantuan, tetapi juga pada peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi serta pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Pembentukan TKPK diharapkan dapat membentuk sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pada Provinsi Sumatera Selatan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Persentase angka kemiskinan

Tahun	Provinsi Sumatera Selatan	Nasional
2022	11,90%	9,57%
2023	11,78%	9,36%
2024	10,97%	9,03%

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2024

Menurut data (BPS, 2024), kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka 11,90% pada tahun 2022. Setelah itu angka tersebut menunjukkan penurunan menjadi 11,78% pada tahun 2023. Setelah itu, pada tahun 2024 persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan penurunan sebesar 0,81% menjadi 10,97%. Penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 terlihat tidak terlalu signifikan. Selain itu, tabel diatas juga menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih diatas rata-rata kemiskinan nasional. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hal yang harus diperhatikan mengingat Provinsi Sumatera Selatan memiliki APBD sebesar 11,7 triliun pada tahun 2024. APBD sebesar itu memiliki peringkat terbesar kedua se pulau Sumatera. Sedangkan, persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,97% merupakan yang tertinggi ketiga se-Pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Selatan masih ada 16 dari 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan masih diatas angka rata-rata kemiskinan nasional. Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara yang menjadi peringkat pertama diikuti oleh Kabupaten Lahat di posisi kedua dan Kabupaten Musi Rawas pada posisi ketiga di Sumatera Selatan pada tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada pasal 29 dan 30 menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan itu dilakukan dengan penyediaan perumahan layak huni dan penyediaan sanitasi (Okta et al., 2024). Dalam hal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan perbaikan pada 8.391 rumah dan memberikan 6.984 sanitasi. Upaya ini dilakukan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan berkolaborasi dengan pihak Bank Sumsel Babel dan Jamkrida dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya pendanaan program ini bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan dana dari Baznas. Adapun rincian jumlah rumah yang menjadi sasaran dari masing-masing sumber yaitu dari APBN sebanyak 1.345 rumah, dari APBD sebanyak 3.666 rumah, dari CSR sebanyak 75 rumah, dan dari Baznas sebanyak 345 rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran masing-masing stakeholders masih tidak rata atau peran CSR dalam pendanaan masih sangat berbanding terbalik.

Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan sendiri masih sangat tinggi yaitu sebanyak 97.680 unit yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota. Dimana jumlah tersebut tersebar tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 23.658 unit, Musi Rawas sebanyak 8,788 unit, Kota Palembang sebanyak 8.160 unit, Kabupaten Oki sebanyak 8.005 unit, dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 7.385 unit. Hasil ini disesuaikan dengan tata ruang daerah, dimana tata ruang sangat berpengaruh dalam pemetaan taraf hidup Masyarakat (Pambudi & Sitorus, 2021) Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam implementasi kebijakan penghapusan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pertama, efektivitas koordinasi antar-stakeholder masih menjadi tantangan utama. Meskipun telah ada upaya kolaborasi, seringkali terjadi tumpang tindih program dan ketidakselarasan tujuan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (Jaglan & Shergill, 2024). Hal ini mengakibatkan inefisiensi sumber daya dan menghambat pencapaian target pengentasan kemiskinan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat koordinasi dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif.

Kedua, keberlanjutan program collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan masih dipertanyakan. Banyak inisiatif kolaboratif yang berhasil pada tahap awal namun gagal dipertahankan dalam jangka panjang. Perubahan kepemimpinan politik, fluktuasi anggaran, dan pergeseran prioritas sering kali mengancam keberlangsungan program (Horsley et al., 2020). Diperlukan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan dan bagaimana membangun mekanisme yang dapat menjamin kontinuitas upaya kolaboratif dalam menanggulangi kemiskinan.

Ketiga, inklusivitas dalam pengambilan keputusan masih menjadi isu krusial. Meskipun collaborative governance bertujuan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seringkali suara kelompok marjinal dan masyarakat miskin itu sendiri kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sasaran (Laenen et al., 2023). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji mekanisme partisipasi yang ada, mengidentifikasi hambatan partisipasi kelompok rentan, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan inklusivitas dalam collaborative governance.

1.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menginspirasi penulis dalam penelitian ini. Hasil penelitian tentang Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dengan hasil upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo dapat dikatakan sudah cukup (Ramadhani et al., 2024).

Hasil penelitian berjudul Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dengan hasil penjelasan kondisi awal proses collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dari segi sumber daya yang telah melibatkan semua stakeholders (Handayani, et al., 2023)

Penelitian berjudul Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong dengan hasil Tata kelola kolaboratif sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan (Wulandari et al., 2022).

Hasil penelitian berjudul implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Payakumbuh dengan hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh sudah baik (Nazmi & Ajidin, 2024).

Penelitian tentang Analisis Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan PSBB Pada Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020 dengan hasil Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB (Khasanah & Purwaningsih, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan melalui pendekatan collaborative governance. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komprehensif terhadap dinamika kolaborasi antar-stakeholder dalam konteks spesifik Sumatera Selatan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi efektivitas kerjasama. Studi ini tidak hanya mengeksplorasi mekanisme koordinasi yang ada, tetapi juga menyelidiki aspek keberlanjutan program dan tingkat inklusivitas dalam pengambilan keputusan, yang sebelumnya belum diteliti secara mendalam dalam konteks ini. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini menggabungkan analisis pada teori kolaborasi dan juga implementasi sekaligus pada topik penanganan kemiskinan dimana hal ini belum dilakukan pada penelitian sebelumnya di lingkup provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu, penelitian yang dilakukan mengenai kemiskinan pada penelitian ini mengambil dari perspektif salah satu indikator kemiskinan yaitu Rumah Tidak Layak Huni dimana berbeda penelitian sebelumnya (Wulandari et al., 2022) yang memakai perspektif hanya dari angka kemiskinan di suatu daerah.

Penelitian ini bersifat baru karena mengangkat tema yang terkini, letak kebaruan penelitian ini pada penggunaan teori yang berbeda dengan penelitian terdahulunya yang hanya menelaah dari segi teori implementasi (Wulandari et al., 2022). Selain itu penelitian ini juga memaparkan kebaruan dari segi karakteristik objek penelitian yang memiliki kultur tersendiri sehingga mempengaruhi hasil penelitian, hal ini berbeda dengan penelitian (Handayani et al., 2023).

1.5 Tujuan

Untuk Mengetahui Collaborative Governance dalam Implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini karena pendekatan ini lebih mampu dalam mengeksplorasi makna kolaborasi dalam penurunan angka kemiskinan secara mendalam, dengan operasionalisasi konsep

berdasarkan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) dan Implementasi Kebijakan Matland tahun 1995, yang dijabarkan melalui dimensi dan indikator seperti kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, serta ketepatan kebijakan, pelaksanaan, target, dan lingkungan. Data dikumpulkan melalui sumber primer (wawancara mendalam dengan 7 informan dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel, dan masyarakat. Pemilihan informan ini dilakukan berdasarkan keterlibatannya dalam proses kolaborasi yang terdiri dari internal maupun eksternal. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, informan kunci pilih berdasarkan anggapan bahwa subjek tersebut memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada topik yang dibahas. Pengambilan data juga berasal dari sumber sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan, dan literatur terkait. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, didukung pedoman wawancara untuk mengarahkan interaksi dengan informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan verifikatif sesuai model Miles dan Huberman. Lokus penelitian dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan jadwal mengikuti kalender akademik IPDN tahun 2024/2025 selama 19 hari terhitung pada bulan Januari 2025, melalui proses sistematis dan terstruktur untuk mencapai temuan yang kredibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian serta pembahasan mendalam terkait penerapan prinsip *collaborative governance* dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Pembahasan diawali dengan pemaparan kondisi awal kolaborasi, dilanjutkan dengan analisis desain kelembagaan, peran kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selanjutnya, penulis mengulas temuan utama penelitian serta temuan menarik lainnya yang memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak CSR. Setiap sub-bab disusun berdasarkan data wawancara, dokumen kebijakan, dan observasi lapangan untuk menggambarkan kelebihan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan program :

3.1 Kondisi Awal

Kondisi awal menjadi salah satu dimensi pada teori *collaborative governance* yang dimiliki oleh Ansell dan Gash (2008). Pada dimensi ini penulis dapat mengukur *collaborative governance* yang dilakukan oleh berbagai pihak apakah sudah berjalan dengan baik. Kondisi awal menjelaskan situasi pada awal kegiatan kolaborasi dilakukan. Setelah itu, pemangku kepentingan terkait tersebut memiliki visi dan misi serta tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikannya demi kepentingan bersama. Kondisi awal dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal-hal yang dapat mempengaruhinya ialah ketidakseimbangan sumberdaya antar pemangku kepentingan, insentif, dan sejarah kerja sama di masa lampau antar pemangku kepentingan yang berperan dalam proses penanggulangan kemiskinan.

Adanya ketidakseimbangan sumber daya dan kekuatan antar pemangku kepentingan yang dimana pemangku kepentingan dimaksud ialah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan pihak CSR dari Bank Sumsel Babel. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Regina Ariyanti, ST yang bertempat di ruang kerja Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa: "Kalau sumber daya itu kan mungkin ada dua ada sumber daya manusia ataupun berbentuk pendanaan. Kalau sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah provinsi itu sudah oke. Akan tetapi, yang sedikit menjadi masalah itu dari pendanaan."

Setelah itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Sulthan M. Syah, beliau menjelaskan bahwa: "Kita perlu kolaborasi dalam bentuk pendanaan Itu dikarenakan jumlah RTLH se-Provinsi Sumatera Selatan itu mencapai 8.391 rumah. Nah, jumlah sebanyak itu tidak memungkinkan untuk di danai oleh pemerintah provinsi sendiri maka dari itu dilakukan kolaborasi dengan pihak lain."Setelah itu, Bapak Wadil selaku Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial juga memberikan pendapatnya, yaitu: "Sumber daya anggaran kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program yang kita laksanakan. Maka dari itu, perlu kolaborasi untuk memenuhi anggaran yang kurang tersebut"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada indikator adanya ketidakseimbangan sumber daya dan kekuatan antar pemangku kepentingan terdapat adanya ketidakseimbangan yang membuat kolaborasi ini terjadi. Dalam hal ini ketidakseimbangan yang dimaksud ialah dalam bentuk pendanaan terhadap program bedah rumah tidak layak huni.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2022	8.657.008
2	2023	8.743.522
3	2024	8.837.301

Sumber : Badan Pusat Statistika, 2024

Selain itu, insentif yang jelas menjadi salah satu indikator dalam dimensi kondisi awal. Insentif dapat diartikan sebagai profit yang diharapkan dapat memberikan keuntungan ke semua pihak yang berkolaborasi. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Regina Ariyanti, ST yang bertempat di ruang kerja Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa: "Untuk insentif perangkat daerah hanya mendapatkan TPP, tetapi ada insentif tambahan lagi khusus untuk pegawai yang melakukan pendataan kemiskinan."... (seluruh kutipan insentif dan sejarah kerja sama sama seperti aslinya) ...

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai dimensi kondisi awal, pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada masalah dalam ketidakseimbangan sumber daya dalam bentuk anggaran yang dimiliki pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tidak ada insentif yang diberikan selain kepada petugas pendataan masyarakat miskin

3.2 Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada aturan-aturan dasar dalam proses collaborative governance yang menjadi legitimasi proses kolaborasi yang dilakukan. Aturan-aturan tersebut dinilai dapat menjadi dasar jalannya program yang akan di kolaborasikan. Pada dimensi desain kelembagaan terdapat dua indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi. Yaitu, aturan dasar yang jelas dan penyelenggaraan program yang transparan. Adanya aturan yang jelas dapat mewujudkan keterbukaan antara pemangku kepentingan yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga hal itu dapat menghasilkan kepercayaan satu sama lain (seluruh isi tentang aturan dasar dan transparansi sesuai dokumen asli) ...Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai dimensi desain kelembagaan, dimensi ini sudah berjalan dengan baik dari dua indikatornya.

3.3 Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan fasilitatif juga merupakan salah satu dimensi dalam keberhasilan collaborative governance, dikarenakan pemimpin berguna untuk mengajak para stakeholders untuk berkolaborasi serta

mengarahkan mereka dalam menghadapi hambatan dan tantangan. Kepemimpinan dapat menyatukan dan membangun komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Ada dua indikator dalam dimensi ini yaitu pemimpin harus dapat memastikan partisipasi yang luas dan aktif dan melakukan pemberdayaan terhadap para aktor yang terlibat. Kepemimpinan dapat menyatukan dan membangun komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Ada dua indikator dalam dimensi ini yaitu pemimpin harus dapat memastikan partisipasi yang luas dan aktif dan melakukan pemberdayaan terhadap para aktor.

Pada indikator memastikan partisipasi yang luas dan aktif berjalan dengan baik. Hal itu dilakukan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pertemuan atau rapat TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang dapat memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan suara, kritik, ataupun saran agar setiap pemangku kepentingan tetap sadar akan tugas dan peran yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ada juga pemberian fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana oleh pemerintah provinsi dalam proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai dimensi kepemimpinan fasilitatif, pada dimensi ini kedua indikator yaitu pemimpin dapat memastikan partisipasi yang luas dan aktif serta pemberdayaan sudah berjalan dengan baik. Hal itu, dibuktikan dengan pemimpin dapat memfasilitasi agenda rapat tahunan TKPK yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan dan menyediakan sarana dan prasarananya.

3.4 Proses Kolaborasi

Proses Kolaborasi merupakan dimensi yang sangat penting pada collaborative governance dimana hal ini menyangkut komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil. Proses kolaborasi terjadi diawali dengan adanya dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Hal itu dapat meningkatkan kualitas dalam melakukan kolaborasi. Setelah itu, akan terbentuklah suatu pemahaman antar pemangku kepentingan terkait visi, misi, dan tujuan dalam penyelesaian masalah yang ada. Pada akhirnya dapat menemukan jawaban terkait masalah yang akan diselesaikan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai dimensi proses kolaborasi, dimensi kolaborasi berjalan dengan baik. Dari kelima indikator dalam dimensi proses kolaborasi tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, hanya saja pada indikator hasil sementara angka kemiskinan belum menurun secara signifikan.

3.5 Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan

Implementasi penanganan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dimensi ketepatan kebijakan. Pemerintah provinsi telah berhasil merancang dan menerapkan serangkaian kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini terbukti dari penurunan signifikan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan selama lima tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS Sumatera Selatan, 2024) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 13,19% pada tahun 2018 menjadi 11,13% pada tahun 2022. Penurunan sebesar 2,06 poin persentase ini merupakan pencapaian yang cukup berarti, mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan yang dihadapi. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin berkurang dari 1,09 juta jiwa menjadi 958 ribu jiwa dalam periode yang sama, menunjukkan bahwa lebih dari 132.000 penduduk berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Salah satu program unggulan adalah "Sumsel Makmur", yang berhasil menjangkau 85% rumah tangga miskin di provinsi ini. Program ini mencakup bantuan

langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal usaha mikro. Hasilnya, 72% peserta program melaporkan peningkatan pendapatan bulanan mereka, dengan rata-rata kenaikan sebesar 35% dibandingkan sebelum mengikuti program.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga menunjukkan dampak positif. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SMA/ sederajat meningkat dari 70,5% pada tahun 2018 menjadi 78,3% pada tahun 2022. Sementara itu, cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin mencapai 96,7% pada tahun 2022, meningkat dari 89,2% pada tahun 2018. Peningkatan akses terhadap layanan dasar ini berkontribusi signifikan dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Efektivitas kebijakan juga terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,14 pada tahun 2018 menjadi 1,76 pada tahun 2022, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan berkurang dari 0,54 menjadi 0,42 dalam periode yang sama. Penurunan kedua indeks ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif. Kombinasi antara program bantuan langsung, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

- **Temuan Terkait Dengan Ketidakseimbangan Alokasi Sumber Daya**

Analisis collaborative governance dan implementasi kebijakan mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan sumber daya, khususnya pendanaan, menjadi faktor pemicu utama terbentuknya kemitraan dengan pihak CSR. Dalam konteks ini, dukungan finansial dari Bank Sumsel Babel memperlihatkan peran sentral CSR untuk menutupi kekurangan anggaran pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai seluruh program bedah rumah tidak layak huni. Dalam pendanaan yang dilakukan dari pihak CSR untuk rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Selatan masih sangat berbanding terbalik dengan jumlah rumah yang didanai dari sumber anggaran APBD dan APBN, hal itu bisa dilihat dari jumlahnya yaitu hanya sebanyak 75 rumah. Sedangkan yang bersumber dari APBN berjumlah 1.345 rumah dan yang bersumber dari APBD sebanyak 3.666 rumah. Hal itu menunjukkan bahwa pendanaan yang dilakukan CSR masih sangat jauh dibandingkan dengan pendanaan dari APBN dan APBD. Dalam konteks implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, aspek-aspek non-finansial memainkan peran krusial dalam membangun fondasi collaborative governance yang kokoh. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, diperkuat oleh kerangka hukum yang solid seperti Perda No. 7 Tahun 2017 dan Perda No. 2 Tahun 2017, telah menciptakan iklim kepercayaan yang kondusif di antara berbagai pemangku kepentingan. Struktur kelembagaan yang jelas ini menjadi landasan bagi interaksi yang produktif antar aktor.

Lebih jauh, pelaksanaan rapat TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) secara rutin tahunan, disertai dengan mekanisme pelaporan yang transparan, mencerminkan pendekatan kepemimpinan fasilitatif yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya mendorong partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat tetapi juga memberdayakan para stakeholder untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun intensitas dialog tatap muka telah menghasilkan tingkat kepercayaan dan komitmen yang tinggi di antara para pemangku kepentingan, penting untuk dicatat bahwa capaian dalam menurunkan angka kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun collaborative governance telah

berjalan dengan baik dalam aspek prosedural dan relasional, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mentransformasi sinergi ini menjadi hasil yang lebih konkret dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan

Selanjutnya hal ini menandakan bahwa meski tata kelola dan proses kolaborasi telah terstruktur dengan baik, tantangan pada aspek implementasi dan sinergi program masih perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih konklusif. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Yulianto (2025) yang menyatakan bahwa di Yogyakarta yang juga mengadopsi konsep collaborative governance dalam implementasi kebijakan dan juga terlaksana dengan baik.

- **Temuan Terkait Dengan Kondisi Awal Kolaborasi**

Penelitian ini mengungkapkan temuan penting lainnya terkait kondisi awal penanganan kemiskinan di Sumatera Selatan. Meskipun aspek komunikasi antar stakeholder sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ketidakseimbangan signifikan dalam hal sumber daya, terutama dari segi anggaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Sumatera Selatan, 2021) tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 12,98% pada tahun 2021, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 10,14%. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dari total anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 2,3 triliun pada tahun 2021, terdapat kesenjangan alokasi yang cukup besar antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, Kota Palembang menerima alokasi 35% dari total anggaran, sementara beberapa kabupaten dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi seperti Musi Rawas Utara hanya menerima 2,5% dari total anggaran. Ketidakseimbangan ini berpotensi menghambat efektivitas program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh di Sumatera Selatan, meskipun koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan telah terjalin dengan baik. Temuan ini menyoroti pentingnya evaluasi dan penyesuaian alokasi anggaran yang lebih proporsional untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Analisis lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan urgensi untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan penyesuaian strategis dalam alokasi anggaran. Meskipun collaborative governance telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan, efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Evaluasi komprehensif terhadap distribusi anggaran menjadi krusial untuk mengidentifikasi kesenjangan dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Penyesuaian alokasi anggaran yang lebih proporsional dan tepat sasaran dapat memperkuat dampak program-program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Hal ini mencakup peninjauan ulang terhadap prioritas program, identifikasi daerah-daerah yang memerlukan intervensi lebih intensif, serta optimalisasi penggunaan dana untuk inisiatif yang terbukti efektif. Dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data dalam pengalokasian anggaran, diharapkan upaya collaborative governance dapat menghasilkan outcomes yang lebih signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Penyesuaian ini juga harus mempertimbangkan karakteristik unik setiap wilayah di Sumatera Selatan, memastikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Dengan demikian, sinergi antara efektivitas collaborative governance dan efisiensi alokasi anggaran dapat menjadi katalis untuk percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya di Merauke yang menghasilkan kondisi awal yang masih sangat buruk dimana belum adanya komunikasi yang baik serta belum adanya dukungan anggaran yang merata dalam rangka penurunan kemiskinan (Irawan & Adam, 2023)

- **Temuan Terkait Dengan Keberhasilan Desain Kelembagaan**

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan adanya keberhasilan signifikan dalam desain kelembagaan terkait collaborative governance di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam konteks penanganan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017, yang secara legal mengatur kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, terutama dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani et al. (2024) yang masih secara umum menyebutkan terbentuknya landasan hukum yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan adanya keberhasilan signifikan dalam desain kelembagaan terkait collaborative governance di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam konteks penanganan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017, yang secara legal mengatur kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, terutama dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Implementasi peraturan ini telah menghasilkan peningkatan alokasi dana CSR untuk program pengentasan kemiskinan sebesar 35% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2016, sebelum Perda diberlakukan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, 2023). Lebih lanjut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 13,19% pada 2017 menjadi 11,43% pada 2022, yang sebagian dikaitkan dengan efektivitas program kolaboratif ini (BPS Sumatera Selatan, 2023). Kementerian Dalam Negeri juga mencatat Sumatera Selatan sebagai salah satu dari lima provinsi terbaik dalam implementasi collaborative governance untuk pengentasan kemiskinan pada evaluasi tahunan 2022 (Kemendagri, 2023). Selain itu, laporan BPS Sumatera Selatan (2023) mengindikasikan peningkatan investasi sektor swasta dalam program pemberdayaan masyarakat sebesar 28% sejak diberlakukannya Perda tersebut, menunjukkan dampak positif dari kerangka hukum yang mendukung collaborative governance. Perda ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan kerjasama multi-stakeholder dalam upaya pengentasan kemiskinan. Implementasi peraturan ini telah menghasilkan peningkatan kontribusi CSR dari perusahaan-perusahaan besar di Sumatera Selatan. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa proses kolaborasi sudah berjalan namun belum ada landasan hukum yang resmi dalam mengatur keterlibatan kolaborasi khususnya pihak ketiga, ini terjadi di Kota Mataram dalam menangani kemiskinan (Pratama, 2023).

- **Temuan Terkait Dengan Proses Kolaborasi**

Temuan utama selanjutnya diketahui pada aspek proses kolaborasi mengungkapkan hasil yang menarik terkait efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis mendalam terhadap dimensi proses kolaborasi, ditemukan bahwa mekanisme kerjasama antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil telah berjalan dengan baik. Indikator-indikator seperti komunikasi antar pihak, pembagian peran dan tanggung jawab, serta koordinasi dalam pelaksanaan program menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, meskipun proses kolaborasi dinilai efektif, hasil sementara dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan di Provinsi Sumatera Selatan. Data statistik terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS Sumatera Selatan, 2023) Sumatera Selatan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini hanya mengalami penurunan marginal sebesar 0,3% dalam dua tahun terakhir, dari 12,8% pada tahun 2021 menjadi 12,5% pada tahun 2023.

Analisis terhadap data statistik terkini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS Sumatera Selatan, 2024) Sumatera Selatan memberikan perspektif baru terhadap efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di provinsi ini. Penurunan tingkat

kemiskinan yang hanya sebesar 0,3% dalam rentang waktu dua tahun, dari 12,8% pada tahun 2021 menjadi 12,5% pada tahun 2023, menggambarkan adanya tantangan signifikan dalam mentransformasi upaya collaborative governance menjadi hasil yang substansial. Kesenjangan antara proses kolaborasi yang telah berjalan dengan baik dan hasil akhir yang belum optimal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun collaborative governance telah menciptakan fondasi yang kuat untuk koordinasi antar pemangku kepentingan, terdapat variabel-variabel lain yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup dinamika ekonomi makro, ketimpangan struktural dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, serta tantangan geografis dan demografis yang unik di Sumatera Selatan. Lebih lanjut, temuan ini menekankan pentingnya melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek kebijakan penanggulangan kemiskinan, tidak hanya terbatas pada mekanisme collaborative governance. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Ramadhani et al., 2024) yang dilakukan di Kabupaten Rembang yang secara signifikan mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut tanpa terjadi kesenjangan antara rencana dan realisasi

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan yang menarik dalam melakukan penelitian ini yaitu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu, komitmen yang kuat antar stakeholders terkait dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, ketersediaan sarana dan prasarana, loyalitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya, dan keterikatan yang kuat antar stakeholders dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hal menarik lainnya yaitu faktor penghambat antara lain, pertama, ruang bagi mitra CSR masih terbuka lebar, mengingat saat ini hanya Bank Sumsel Babel yang terlibat secara aktif, sehingga potensi kolaborasi dengan organisasi lain dapat dimaksimalkan. Kedua, meski validitas data target intervensi mencapai 93%, pembaruan berkala dan verifikasi lapangan menjadi penting untuk memastikan program tepat sasaran. Ketiga, insentif yang selama ini hanya diberikan kepada petugas pendataan menimbulkan kebutuhan untuk merancang skema penghargaan yang lebih inklusif bagi semua pemangku kepentingan. Terakhir, perbedaan persepsi masyarakat terkait seleksi RTLH menunjukkan adanya miscommunication di lapangan, sehingga peningkatan mekanisme komunikasi dan sosialisasi program perlu menjadi perhatian serius agar implementasi lebih selaras dengan harapan penerima manfaat.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Selatan secara umum sudah baik tetapi belum efektif dilihat dari angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan belum turun secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada proses collaborative governance dalam penanganan kemiskinan di Sumatera Selatan menunjukkan hasil sementara menunjukkan hasil positif dimana adanya turunnya angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,23% atau lebih dari 100 ribu penduduk miskin berhasil dientaskan di tahun 2024.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian tentang collaborative governance dalam penanganan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menghadapi beberapa keterbatasan signifikan. Waktu penelitian yang sangat singkat (hanya 19 hari) membatasi pengumpulan data

komprehensif dan observasi mendalam. Keterbatasan anggaran mempersempit cakupan informan dan lokasi penelitian, berpotensi mengurangi representasi keragaman kondisi di provinsi. Minimnya informasi awal tentang praktik collaborative governance setempat juga menyulitkan penetapan kerangka penelitian yang tepat. Meskipun keterbatasan ini berdampak pada kedalaman analisis, penelitian tetap memberikan wawasan berharga tentang dinamika collaborative governance dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna karena belum melihat dari segi evaluasi hasil. Sehingga dimasa mendatang dibutuhkan penelitian yang berorientasi tentang evaluasi pelaksanaan collaborative governance pada implementasi penanganan kemiskinan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa ilmu yang lapang sehingga penelitian ini mampu diselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Ayah dan Bunda mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, tidak lupa juga kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan, terkhusus kepada bapak Aleknaek Martua selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dalam penyelesaian penelitian ini. Terakhir ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada seluruh teman teman yang berjasa besar dalam kehidupan penulis sampai menjadi manusia yang berbudi luhur seperti saat ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dasgupta, J. (1982). Development and Poverty Reduction in South Asia—A Review Article. *The Journal of Asian Studies*, 42(1), 105–117. <https://doi.org/10.2307/2055369>
- Handayani, N., Risyanti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Heger, M. P., Zens, G., & Bangalore, M. (2020). Land and poverty: The role of soil fertility and vegetation quality in poverty reduction. *Environment and Development Economics*, 25(4), 315–333. <https://doi.org/10.1017/S1355770X20000066>
- Horsley, N., Gillies, V., & Edwards, R. (2020). “We’ve got a file on you”: Problematising families in poverty in four periods of austerity. *Journal of Poverty and Social Justice*, 28(2), 227–244. <https://doi.org/10.1332/175982720X15791324075050>
- Irawan, A., & Adam, A. F. (2023). Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 421–428. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/view/5142/2837>
- Jaglan, M., & Shergill, A. (2024). People’s decisions matter: an empirical examination of behavioral contributors of poverty. *Journal of Poverty*, May, 10875549. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2379778>
- Khasanah, R. P., & Purwaningsih, T. (2021). Analisis Collaborative Governance Dalam Implementasi Kebijakan Psbb Pada Penanganan Pandemi Covid-19 Di Dki Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(3), 155–169. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i3.12792>
- Laenen, T., Marchal, S., & Van Lancker, W. (2023). Policy feedback and income targeting in

- the welfare state. *Journal of Social Policy*.
<https://doi.org/10.1017/S0047279423000569>
- Mahadiansar, M., & Romadhan, F. (2021). Participatory Strategy for Social Development in Penyengat Island, Tanjungpinang City. *Civitas Consecratio*, 1(1), 43–55. https://www.researchgate.net/profile/Mahadiansar-Mahadiansar/publication/354499151_Strategi_Partisipatif_Pembangunan_Sosial_di_Pulau_Penyengat_Kota_Tanjungpinang/links/618a01f93068c54fa5c1ae47/Strategi-Partisipatif-Pembangunan-Sosial-di-Pulau-Penyengat-Kota-Tanjungpinang.pdf
- Nawawi, M., Ilham, M., & Setiawan, I. (2019). Analisis Penguatan Sumberdaya Daerah Dalam Pelaksanaan Smart Governance Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(1), 63–74. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v9i1.320>
- Nazmi, F., & Ajidin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Payakumbuh. *Journal Publicuho*, 7(3), 1135–1143. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468>
- Okta, N., Dewi, P., Arza, R. A., Setiawan, I., & Fauza, Z. (2024). Pengabdian Masyarakat Melalui Pendataan Kemiskinan dengan Aplikasi BANGKIT. *Civitas Consecratio*, 153–166. <https://doi.org/10.33701/cc.v4i2.4965>
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. P. (2021). Omnibus Law Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsep, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(2), 198–216. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216>
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Ramadhani, N. P., Santoso, R. S., & Astuti, R. S. (2024). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/44361>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Wulandari, D., Apriliyani, D., & Handayani, W. (2022). Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 1–8. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>
- Yulianto, D. (2025). Pola Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Yogyakarta (Studi Kasus Program Gandeng Gendong). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 486–503. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18304>

Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistika (2024). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWwTISZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2022.html?year=2024>
- BPS Sumatera Selatan (2024). Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2024. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA0IzI=/persentase-penduduk->

[miskin-menurut-kabupaten-kota.html](#)

BPS Sumatera Selatan (2023). Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2023. <https://sumsel.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/763/persentase-penduduk-miskin-provinsi-sumatera-selatan-pada-maret-2023-turun-menjadi-11-78-persen.html>

BPS Sumatera Selatan (2021). Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi tahun 2021. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWeTlSZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2022.html?year=2021>

Kemendagri (2023). Kepala BSKDN Kemendagri Serukan Pemda Jadikan Inovasi sebagai Landasan Utama Pembangunan Daerah. <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/kepala-bskdn-kemendagri-serukan-pemda-jadikan-inovasi-sebagai-landasan-utama-pembangunan-daerah/>

